


**PEMBERIAN KEWENANGAN TAMBAHAN KEPADA
DOKTER GIGI DALAM RANGKA
PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN
(Kajian Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran)**

TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh
Nelson Situmorang
NIM 10.93.0073

	NO. INV : 280 / s2 / MHK / c.1
	TGL : 18 Januari 2013
PARAF : <i>N.</i>	PERPUSTAKAAN

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012


T E S I S

**PEMBERIAN KEWENANGAN TAMBAHAN KEPADA DOKTER GIGI
DALAM RANGKA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN**

**(Kajian Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran)**

diajukan oleh
Nelson Situmorang
NIM 10.93.0073

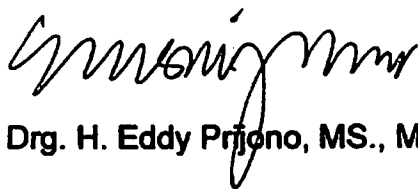
telah disetujui oleh

Pembimbing Utama


Dr. Endang Wahyati, SH., MH

tanggal...11-12-2012

Pembimbing Pendamping



Drg. H. Eddy Prjono, MS., MH.Kes

tanggal...11-12-2012



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **NELSON SITUMORANG**

Nim : **10.93.00673**


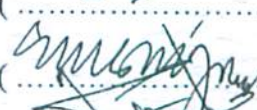

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 10 November 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **Dr. Endang Wahyati, SH., MH**
2. **drg. Eddy Priyono, MS., MHKes**
3. **Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN**


(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 10 November 2012



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)
**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Strata 2 Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini.

Penelitian tesis dilakukan dengan latar belakang distribusi dokter gigi spesialis yang tidak merata, dan terpusat di kota besar yang mengakibatkan pemerataan pelayanan kesehatan tidak terwujud, hal ini bertentangan dengan isi beberapa peraturan perundang undangan dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk mendapat pelayanan kesehatan secara merata. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang melahirkan wacana pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi, yang diharapkan dapat menjadi solusi terbatas terhadap permasalahan di atas. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi pada daerah-daerah tertentu dapat menjadi solusi terbatas sehingga pemerataan layanan kesehatan dapat terwujud.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah begitu banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan demi tercapainya penulisan tesis ini dengan baik. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., selaku koordinator kelas paralel Bandung Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang

Ibu Dr. Endang Wahyati, SH., MH., selaku Pembimbing Utama yang dengan luar biasa di tengah-tengah kesibukannya membimbing dengan kesabaran dan tanpa kenal lelah, dan Bapak drg. H. Eddy Prijono, MS., MH.Kes, selaku Pembimbing Pendamping yang dengan kesabarannya dan tanpa pamrih telah berkenan membimbing di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Keluarga besar “Teman Seperjuangan” Angkatan X dan segenap staf civitas akademika Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang kelas paralel Bandung yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

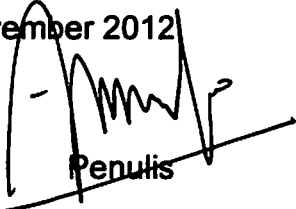
Kepada Ibunda Sontaria Saragi dan Ayahanda Mangoloi Situmorang yang penulis cintai dan hormati, yang sepanjang waktu mencurahkan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak ternilai telah membesarkan, memberikan dorongan semangat serta tidak pernah berhenti mendoakan, penulis sampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya, semoga Tuhan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat berlimpah, umur yang panjang dan kesehatan.

Rasa terima kasih yang khusus penulis sampaikan kepada istri “Parsonduk Bolonku” tercinta Selviana Sembiring yang dengan luar biasa banyak memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini, serta senantiasa dengan penuh kesabaran, pengertian dan

pengorbanan yang tiada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Buat anak-anakku tersayang Gabriella, Daniel, Immanuella dan Samuel (ELNIVASA) yang menjadi pendorong dan pemicu semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat paling tidak untuk penulis sendiri dan bagi mereka yang membacanya, serta lebih jauh lagi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk para pembuat keputusan.

Bandung, November 2012



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	27
G. Penyajian Thesis	33
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Tambahan Bagi Dokter Gigi.....	35
1. Kewenangan	35
2. Kewenangan Dokter Gigi.....	44
a. Tenaga Kesehatan dan Kedokteran Gigi	44
b. Kedokteran Gigi	45
c. Standar Profesi Dokter Gigi	52

d. Kewenangan Profesional Dokter Gigi	54
3. Gambaran Umum Praktik Dokter Gigi	58
B. Pemerataan Pelayanan Kesehatan	59
1. Pelayanan Publik	59
2. Pelayanan Kesehatan	68

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Pengantar	77
E Hasil Penelitian	80
1. Gambaran SDM Dokter di Indonesia	80
2. Gambaran SDM Kesehatan Non Medis di Indonesia	84
C Pembahasan.....	87
1. Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi	87
a. Latar Belakang Pemberian Kewenangan.....	87
b. Dasar Hukum Pengaturan Kewenangan Tambahan.....	97
c. Tujuan Pengaturan Kewenangan Tambahan.....	97
d. Bentuk Pengaturan Kewenangan Tambahan	106
e. Ruang Lingkup Kewenangan Tambahan.....	107
f. Akibat Hukum Pemberian Kewenangan Tambahan	110
2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan	113
a. Latar Belakang Pemerataan Pelayanan Kesehatan	113
b. Dasar Hukum Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	118
c. Tujuan Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	125
d. Bentuk Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan.....	128
e. Ruang Lingkup Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	131
f. Akibat Hukum Pengaturan Pemerataan Pelayanan	

Kesehatan	135
3. Hubungan antara Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi dan Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	136

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran	143
Daftar Pustaka	145

PERNYATAAN

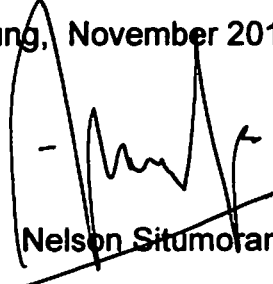
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nelson Situmorang, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0073

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, November 2012



Nelson Situmorang

ABSTRAK

Penumpukan secara berlebihan dokter gigi spesialis di kota-kota besar berbanding terbalik dengan kebutuhan di daerah. Upaya penanggulangan persoalan ini telah memunculkan gagasan pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang "Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Kesehatan: Kajian Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran".

Kajian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kualifikasi penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan ketidak hadiran dokter gigi spesialis sebagai pihak yang berkompeten dalam penanganan tindakan kedokteran gigi tertentu, telah menjadikan konsep pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi menjadi urgen dan relevan. Urgensi dan relevansi pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah tentang pemerataan pelayanan kesehatan. Pada intinya ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan tambahan kepada dokter gigi umum dalam melakukan tindakan dokter gigi spesialis didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih diperlukan dukungan berupa ketentuan teknis, untuk memberikan jaminan hukum bagi dokter gigi yang bersangkutan.

Kata Kunci: Kewenangan Tambahan, Dokter Gigi, Pemerataan Pelayanan Kesehatan

ABSTRACT

The excessive number of dentist in big cities is inversely proportional to the needs of the area. The problem solving has led to the idea of granting additional powers to the dentist. It is needed to conduct a research about "Provision of Additional Authority To Dentist in the Context of Equitable Healthcare: A Study Against the Regulation of the Minister of Health Number 2052/Menkes/Per/X/2011 Number of Licensed Practical and Implementation of Medical Practice".

The study is conducted using qualitative descriptive analysis approach. The qualification of the research is normative by using secondary data, such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results show the absence of dental specialists as a competent in handling certain actions dentistry, has made the concept of granting additional powers to the dentist for being urgent and relevant. The urgency and relevance of granting additional powers to the dentist is closely related to equitable health care policy. In essence, the legal provisions governing the additional authority to a general dentist in doing dental specialist based on the Regulation of the Minister of Health 2052/Menkes/Per/X/2011 Number of Licensed Practical and Implementation of Medical Practice. However, its implementation is still needed the support of the technical provisions, to provide a legal guarantee for a dentist in question.

Keywords: Additional Authority, Dentists, Health Care Equity